

SKRIPSI

PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA  
LINGKUNGAN PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK  
KANTOR WILAYAH 02 PADANG

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

TAUFIK HIDAYAT NELZY  
BP. 06 140 231

Program Kekhususan: Hukum Perdata Ekonomi (PK II)



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

No.Reg: 3079/PKII/05/2010



**PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA  
LINGKUNGAN PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)**

**TBK KANTOR WILAYAH 02 PADANG**

**(Taufik Hidayat Nelzy, 06140231, Fakultas Hukum UNAND,**

**68 halaman, 2010)**

**ABSTRAK**

Dalam penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia terutama untuk Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang maka dikeluarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Aturan ini diharapkan dapat mampu mendorong dan mengembangkan keberadaan Usaha Kecil / Mikro di Indonesia serta dapat memberikan suatu tanggung jawab sosial kepada masyarakat baik dalam bentuk bantuan hibah maupun pemberian fasilitas bagi masyarakat.

Untuk memperjelas penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) BUMN, maka penulis melakukan penelitian dan penulisan tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sesuai dengan Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007 pada BNI Kantor Wilayah 02 Padang dan BNI SKC Padang. Oleh karena itu, penulis mencoba merangkup pelaksanaan tersebut kebeberapa persoalan yakni mengenai perencanaan, kebijakan, serta bentuk program PKBL, mengenai pelaksanaan PKBL, dan mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PKBL.

Untuk menjawab persoalan-persoalan diatas, dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dan sumber data dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan termasuk wawancara.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa melaksanakan PKBL PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk dilaksanakan melalui BNI Kantor Wilayah 02 Padang untuk Program Bina Lingkungan dan BNI SKC Padang untuk Program Kemitraan. Dalam hal penyaluran dana PKBL diberikan oleh Kantor Pusat BNI Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan (*Corporate Secretary*) kepada setiap Kantor Wilayah / Kantor Cabang / SKC. Adapun program yang diberikan mengenai Kredit Kemitraan BUMN BNI dan program-program sosial yang dapat mengembangkan kehidupan masyarakat. Selain itu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PKBL seperti belum adanya sistem yang mengakomodir calon Mitra Binaan termasuk peraturan-peraturan yang telah dibuat dan penyaluran dana yang kurang merata untuk pembinaan lingkungan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan tingkat kehidupan ekonomi masyarakat yang terus berkembang, juga berpengaruh pada perkembangan dunia usaha. Iklim usaha semakin mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini juga diikuti dengan kemajuan di bidang teknologi, yang mengakibatkan semakin mutakhirnya teknologi yang digunakan oleh kalangan dunia usaha tersebut.

Kemajuan yang seperti itu tentunya membawa dampak yang positif bagi perkembangan dunia investasi dan bisnis di Indonesia. Selain itu turut berperan serta dalam peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun yang sangat disayangkan, tidak jarang perusahaan-perusahaan yang ada terlalu terfokus kepada kegiatan ekonomi dan produksi yang mereka lakukan sehingga melupakan keadaan masyarakat di sekitar wilayah beroperasinya dan juga melupakan aspek-aspek kelestarian lingkungan. Padahal sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945<sup>1</sup>, yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Dari aturan hukum tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan sosial yang baik dan lingkungan hidup yang sehat.

---

<sup>1</sup> Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945



Di lain pihak, seiring dengan perkembangan jaman juga mendorong masyarakat untuk menjadi semakin kritis dan menyadari hak-hak asasinya serta berani mengekspresikan tuntutan mereka terhadap perkembangan dunia bisnis Indonesia. Hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggung jawab. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya.

Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga terkesan mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan suatu entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya.

Konsep *Corporate Social Responsibility* sesungguhnya mengacu pada kenyataan, bahwa perusahaan adalah badan hukum yang dibentuk oleh manusia dan terdiri dari manusia. Ini menunjukkan bahwa sebagaimana halnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, demikian juga dengan perusahaan (sebagai lembaga yang terdiri dari manusia-manusia) tidak bisa hidup, beroperasi, dan memperoleh keuntungan bisnis tanpa pihak lain<sup>2</sup>.

Selain itu, konsep yang mendasari *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang sering dianggap inti dari Etika Bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang

---

<sup>2</sup> Soeryo Karaf, 1998, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 122

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perencanaan PKBL pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk dilakukan pada Kantor BNI Wilayah 02 Padang dalam ruang lingkup Program Bina Lingkungan dan BNI Sentra Kredit Kecil (SKC) Padang dalam ruang lingkup Program Kemitraan.  
BNI SKC Padang dalam mengelola dana Program Kemitraan merupakan suatu unit non-bisnis dan bersifat kemitraan (tidak mencari keuntungan) dimana dana dari hasil kredit Program Kemitraan dapat digulirkan kembali untuk PKBL lainnya. Dan salah satu program andalannya adalah Kredit Kemitraan BUMN BNI.
2. Pelaksanaan PKBL pada BNI SKC Padang dalam melakukan penyaluran kredit tidak hanya berhadapan langsung dengan calon Mitra Binaan tetapi juga dapat melalui kerjasama dengan Lembaga Penyalur seperti Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (LM-FEUA) sehingga dapat mempercepat penyaluran dana tersebut kepada masyarakat (Mitra Binaan lainnya)  
Kantor BNI Wilayah 02 Padang dalam menyalurkan dana program Bina Lingkungan berupa dana Hibah yang langsung kepada masyarakat berdasarkan program-program yang telah dijadikan acuan dalam penerapan *Corporate Social Responsibility*.